

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2003).

Sedangkan model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan Solow berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = f(K, AN)$$

dimana:

Y = Output nasional (kawasan)

K = Modal (kapital)

AN = Tenaga kerja intensif

Model pertumbuhan ini memandang bahwa rasio modal dan kapital (*capital output ratio*) bersifat dinamis dan cepat berubah. Sehingga untuk menciptakan output tertentu, dapat digunakan jumlah modal yang berbeda-beda pula sesuai dengan kebutuhan. Jika lebih banyak modal yang digunakan (*capital intensive*) maka tenaga kerja yang diperlukan sedikit. Sebaliknya jika tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak (*labor intensive*) maka modal yang dibutuhkan sedikit (Victor, 2005).

Model pertumbuhan ini pula melihat peran kemajuan teknologi/inovasi sangat besar dalam memacu pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu pemerintah perlu mendorong terciptanya kreatifitas dalam kehidupan masyarakat, agar produktifitas tenaga kerja terus meningkat (Tarigan, 2004 dalam Victor, 2005).

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier.

Untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah tumbuh secara positif atau negatif dapat dilihat dari perkembangan data PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini tidak hanya dilihat dari total PDRB-nya saja, tetapi dapat dilihat pula untuk masing-masing lapangan usaha dimana yang tumbuh dengan cepat, lambat atau bahkan turun.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan tidak banyak berarti jika tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduknya. Dengan demikian persentase pertumbuhan ekonomi harus di atas pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari PDRB perkapita, jika PDRB per kapita naik maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat juga, demikian pula sebaliknya.

2.2 Disparitas Pendapatan

Kesenjangan pendapatan atau disparitas pendapatan merupakan bagian dari *inequality* (ketidaksetaraan) yaitu: *unequal rewards or opportunities for different individuals within a group or groups within a society* (Marshall 1998: 313).

Inequality bukan semata dalam hal pendapatan dan asset (meskipun ini yang utama) tapi juga dalam hal kekuasaan, *prestige* (kebanggaan), status sosial, gender, kondisi kerja, kepuasan kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dll. (Todaro, 2006).

Disparitas antar wilayah adalah perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Setiap daerah selalu memiliki wilayah yang maju secara ekonomi dan ada wilayah yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lain lain.

Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah pada perkembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah dan daerah (Alam, 2006).

Menurut Todaro, disparitas pendapatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya yaitu:

1. Tidak semata terjadi karena 'kelemahan' individu tapi bisa juga karena kondisi sosial;
2. Melebarnya perbedaan akses terhadap faktor produksi (modal, tanah, sumber daya manusia yang berkualitas dll.) serta kesempatan berusaha; Perbedaan akses ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:
 - a. Tatanan dunia yang tidak adil: perbudakan, penjajahan, hegemoni Negara adikuasa dll;
 - b. Tidak adanya *good governance*, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
 - c. "Lingkaran setan" kemiskinan.
3. Miskin akibat pendidikan kurang – penghasilan rendah – miskin;
4. Miskin akibat kondisi hidup tak sehat – produktivitas rendah – penghasilan rendah – miskin.

2.3 Pengukuran Disparitas

Untuk mengukur dan mengetahui disparitas suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dapat digunakan beberapa metode diantaranya yaitu:

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorentz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama waktu tertentu.

Semakin jauh jarak Kurva Lorentz dari garis diagonal, maka kesenjangan/disparitas pendapatan yang terjadi semakin lebar.

Sebaliknya apabila Kurva Lorentz semakin dekat dengan garis diagonal, maka disparitas yang terjadi semakin kecil. Garis diagonal merupakan garis yang menunjukkan kondisi dimana distribusi pendapatan merata sempurna (Todaro, 2006).

2. *Gini Coefficient*

Koefisien Gini adalah ukuran ketidak merataan atau kesenjangan pendapatan/kesejahteraan secara agregat (keseluruhan). Nilai koefisien Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (kesenjangan sempurna).

Pengukuran tingkat kesenjangan diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva lorentz dibagi dengan luas separuh bidang dimana dimensi kurva lorentz tersebut berada (Todaro, 2000).

Koefisien Gini banyak digunakan oleh beberapa negara sebagai indikator ketidakmerataan. Namun metode ini mengandung kelemahan-kelemahan yaitu : (1) sangat sensitif terhadap perubahan distribusi pendapatan kelas menengah; (2) kurang memenuhi prinsip transfer; (3) sulit melakukan dekomposisi Koefisien Gini; dan (4) sulit untuk diinterpretasikan (Achjar, 2004).

3. *Theils Entropy Index (Ix)*

Konsep Theils Entropy Index pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional serta distribusi produk domestik bruto (Kuncoro, 2002).

4. *Indeks Williamson*

Prinsip perhitungan Indeks Williamson pada dasarnya sama dengan penghitungan *coefficient of variation* yang diberi pembobotan dengan jumlah penduduk, sehingga Indeks Williamson disebut dengan *Weighted Coefficient of Variation (CVw)*.

Dalam penelitian ini digunakan Indeks Williamson sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat karena ukuran ini memiliki kelebihan, yaitu sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan untuk mencermati trend kesenjangan yang terjadi sehingga indeks ini mudah dan praktis untuk melihat disparitas (Achjar, 2004) selain itu penghitungan Indeks Williamson ini bersifat agregat sehingga memudahkan dalam penghitungan.

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Menurut UNDP, dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia itu misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh Badan PBB untuk Pembangunan Manusia.

Dengan pertimbangan itu maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi regional. Hal ini penting karena kebijakan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain peningkatan kualitas modal manusia diharapkan juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota yang memiliki keragaman sosial ekonomi yang tinggi

Pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang mungkin lebih penting dari investasi modal fisik. Ditemukan dalam berbagai penelitian di sejumlah negara, pendidikan dan kesehatan memberi sumbangan amat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada penggunaan modal fisik menjadi lebih efisien dan tenaga kerja akan menjadi lebih produktif. Dengan demikian, maka produktivitas baik modal fisik maupun tenaga kerja akan meningkat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dapat menurun (Maqin, 2007).

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan penduduk hanya difokuskan pada tingkat pendidikan dasar karena hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat cenderung masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar yang dicerminkan pada penyediaan prasarana pendidikan berupa jumlah bangunan sekolah dasar dan rasio guru terhadap murid pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan tingkat kesehatan difokuskan pada pemenuhan layanan kesehatan dasar yang dicerminkan oleh penyediaan prasarana puskesmas dan tenaga kesehatan/paramedis yang bekerja di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan Sadikin (2005) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kudus menggunakan variabel ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sebagai variabel yang mempengaruhi PDRB.

2. Infrastruktur jalan

Kurang lancarnya perdagangan antar wilayah yang disebabkan oleh adanya kendala transportasi dan infrastruktur menjadi penyebab kesenjangan ekonomi regional (Salmon, 2005). Infrastruktur jalan sebagai penyokong kegiatan perdagangan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika infrastruktur jalan di suatu wilayah tidak cukup

baik maka proses perdagangan antar wilayah akan terhambat dikarenakan pengiriman barang menjadi terlambat.

Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor yang cukup besar peranannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah.

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2001) yang meneliti tentang disparitas wilayah di Kabupaten Pematang.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan dalam jumlah yang cukup dalam suatu wilayah, merupakan sumber daya yang sangat berharga ketika dihadapkan pada permintaan tenaga kerja. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan antar wilayah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja berarti mendorong peningkatan output regional, dengan asumsi peningkatan tenaga kerja diikuti dengan peningkatan produktivitas. Secara teori daya tarik dari tenaga kerja adalah upah atau kompensasi yang mereka dapatkan, jika upah mereka besar maka ada kecenderungan produktivitas mereka akan naik dalam proses produksi, yang berarti dengan meningkatnya proses produksi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengambilan faktor TPAK sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadikin (2005) yang menyebutkan bahwa selain ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan, faktor produktivitas tenaga kerja yang

diwakili oleh TPAK juga mempengaruhi disparitas pendapatan di Kabupaten Kudus.

4. Alokasi Investasi

Dalam model pertumbuhan Harod-Domar, investasi didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal (*capital stock*). Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi (Jhingan, 2003).

Menurut Todaro (2006), bahwa ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara maju ditunjang dengan adanya investasi yang tinggi. Sebaliknya negara terbelakang dengan investasi yang rendah menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Sebab utama kekurangan modal di negara terbelakang adalah karena kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pendapatan per kapita rendah, penduduk tidak dapat menabung banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk diinvestasi lebih lanjut hanya sedikit. Di negara-negara seperti tersebut, terdapat kesenjangan pendapatan yang begitu parah (Jhingan, 2003).

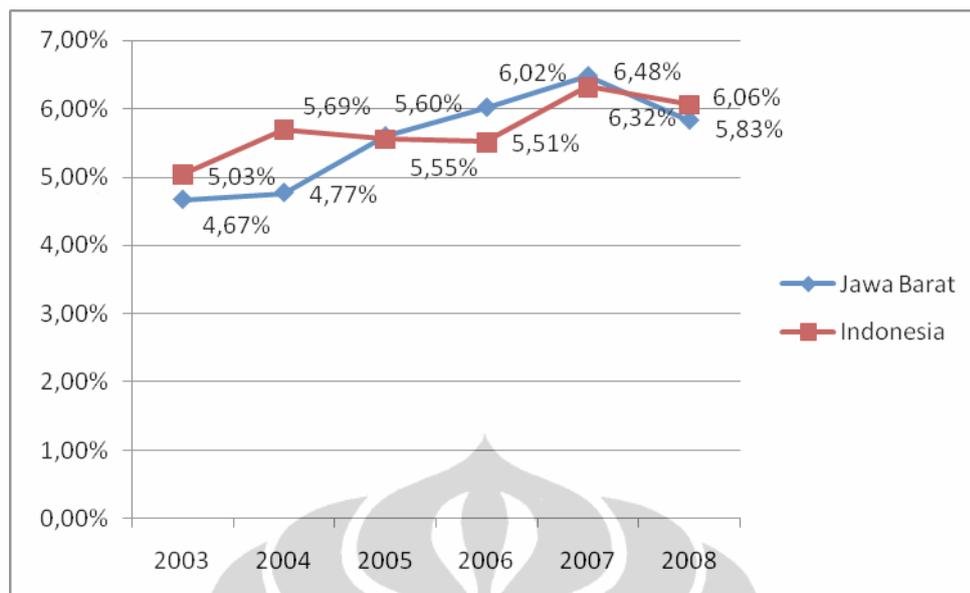
2.5 Karakteristik Wilayah Penelitian

Wilayah Jawa Barat, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara, tentu saja menjadi barometer kondisi makro perekonomian Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu sekitar 42 juta orang, dengan jumlah wilayah administratif sebanyak 26 kabupaten/kota. Kondisi ini tentu saja menjadi potensi untuk menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat ke arah yang lebih maju. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai regulator, dalam menyusun berbagai

kebijakan dalam bidang ekonomi, haruslah yang pro aktif terhadap proses akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dinamika ekonomi makro di tingkat nasional sebagaimana terjadi saat ini, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Gejolak ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008, memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Jawa Barat. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya berdampak bagi dunia usaha dan rumah tangga, tetapi juga menerpa aspek penawaran dan permintaan. Sektor yang sangat tertekan oleh dampak tersebut adalah sektor angkutan, industri pengolahan, bangunan, dan perdagangan. Sedangkan sektor ekonomi nondominan juga mengalami hal yang sama seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Keadaan tersebut berimplikasi langsung terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2008 menunjukkan adanya perlambatan. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang hanya mampu tumbuh sebesar 5,83 persen, sedangkan laju pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 6,06 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya suatu pergeseran pola, dimana posisi Jawa Barat selama kurun waktu 2005-2007 mampu menunjukkan kinerja yang membaik, yaitu dengan LPE yang selalu berada diatas LPE nasional (grafik 2.1).



Sumber : PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat 2006-2008

**Grafik 2.1. LPE Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2003-2008
Atas Dasar Harga Konstan 2000**

Perekonomian Provinsi Jawa Barat merupakan akumulasi dari kinerja perekonomian kabupaten/kota di Jawa Barat. Tahun 2007 laju pertumbuhan Jawa Barat mampu tumbuh 6,48% dari 6,02% pada tahun 2006. Namun pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melemah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,83%. Hal ini sedikit banyak merupakan imbas dari krisis global yang terjadi. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dikatakan relatif baik. Hal ini menunjukkan kekuatan perekonomian Jawa Barat dalam kondisi tekanan krisis global yang melanda.

Setiap kabupaten/kota memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-geografis. Potensi ekonomi tersebut bisa tergambar dari peranan kesembilan sektor lapangan usahanya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk melihat sektor-sektor yang memberi kontribusi yang dominan dan kurang dominan maka harus membandingkannya antar wilayah. Untuk mengamati posisi relatif kinerja perekonomian kabupaten/kota terhadap kabupaten/kota lainnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. tersebut memperlihatkan kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap total PDRB se-Jawa Barat. Kisaran kontribusi PDRB dengan

minyak dan gas bumi (migas) kabupaten/kota yaitu antara 0,25 persen sampai 14,63 persen, sedangkan kontribusi PDRB tanpa migas kabupaten/kota berkisar antara 0,27 persen sampai 15,46 persen. Dalam beberapa analisis, faktor 'minyak dan gas' (migas) perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena nilai tambah yang terbentuk dari migas ini sangat mempengaruhi pembentukan PDRB.

Tabel 2.1.
Rank PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
Di Jawa Barat Tahun 2008

Rank	Termasuk Migas			Tanpa Migas		
	Kab/Kota	PDRB (Milyar Rp)	Share (%)	Kab/Kota	PDRB (Milyar Rp)	Share (%)
1	Kab. Bekasi	82.977,55	14,63	Kab. Bekasi	81.469,28	15,46
2	Kota Bandung	60.441,49	10,66	Kota Bandung	60.441,49	11,26
3	Kab. Bogor	58.389,41	10,29	Kab. Bogor	58.389,41	10,88
4	Kab. Indramayu	40.934,41	7,22	Kab. Karawang	39.087,28	7,28
5	Kab. Karawang	40.855,82	7,20	Kab. Bandung	37.876,70	7,05
6	Kab. Bandung	38.282,17	6,75	Kota Bekasi	29.525,36	5,50
7	Kota Bekasi	29.525,36	5,21	Kab. Garut	20.360,84	3,79
8	Kab. Garut	20.360,84	3,59	Kab. Sukabumi	15.844,36	2,95
9	Kab. Sukabumi	16.133,20	2,84	Kab. Cianjur	15.680,24	2,92
10	Kab. Cianjur	15.680,24	2,76	Kab. Cirebon	15.564,72	2,90
11	Kab. Cirebon	15.564,72	2,74	Kab. Indramayu	14.510,45	2,70
12	Kab. Ciamis	14.500,88	2,56	Kab. Ciamis	14.500,88	2,70
13	Kab. Bandung Barat	14.220,41	2,51	Kab. Bandung Barat	14.220,41	2,65
14	Kab. Subang	13.745,08	2,42	Kab. Purwakarta	13.215,85	2,46
15	Kab. Purwakarta	13.215,85	2,33	Kota Depok	12.542,50	2,34
16	Kota Depok	12.542,50	2,21	Kab. Subang	12.501,45	2,33

17	Kota Cimahi	10.716,29	1,90	Kota Cimahi	10.716,29	2,00
18	Kota Cirebon	10.697,97	1,89	Kota Cirebon	10.697,97	1,99
19	Kab. Tasikmalaya	10.328,58	1,82	Kab. Tasikmalaya	10.328,58	1,92
20	Kab. Sumedang	10.300,94	1,82	Kab. Sumedang	10.300,94	1,91
21	Kota Bogor	10.089,94	1,78	Kota Bogor	10.089,94	1,88
22	Kab. Majalengka	8.297,70	1,46	Kab. Majalengka	8.135,82	1,52
23	Kota Tasikmalaya	7.159,12	1,26	Kota Tasikmalaya	7.159,12	1,33
24	Kab. Kuningan	7.047,93	1,24	Kab. Kuningan	7.047,93	1,31
25	Kota Sukabumi	3.742,66	0,66	Kota Sukabumi	3.742,66	0,70
26	Kota Banjar	1.433,56	0,25	Kota Banjar	1.433,56	0,27
Total Kab/Kota		567.184,62	100,00		535.384,03	100,00

Sumber : PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat 2006-2008

Dari tabel 2.1 terlihat lima besar kontributor utama PDRB kabupaten/kota dengan migas terhadap jumlah Jawa Barat tahun 2008 masing-masing adalah Kabupaten Bekasi (14,63%), Kota Bandung (10,66%), Kabupaten Bogor (10,29%), Kabupaten Indramayu (7,22%) dan Kabupaten Karawang (7,20%), dan tiga kontributor terkecil PDRB kabupaten/kota terhadap jumlah PDRBnya adalah Kota Banjar, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan yang masing-masing sebesar (0,25%), (0,66%) dan (1,24%).

Namun demikian, apabila dicermati dari PDRB tanpa migas, terjadi pergeseran posisi peranan yang cukup signifikan bagi Kabupaten Indramayu. Peranan Kabupaten Indramayu dengan migas terhadap total PDRB kabupaten/kota berada pada posisi keempat (7,22%), namun apabila migasnya dikeluarkan posisinya turun menjadi kesebelas (2,70%). Hal ini bisa dijelaskan karena sektor pertambangan dan industri migas di Kabupaten Indramayu sangat dominan terhadap struktur perekonomiannya.

Berbeda halnya dengan enam kabupaten lainnya yang memiliki migas tetapi tidak terlalu mempengaruhi posisinya apabila migasnya dikeluarkan dari PDRB kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan kontribusi migas di enam kabupaten tersebut (Bandung, Bekasi, Sukabumi, Karawang, Majalengka dan Subang) tidak signifikan.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2008, yang diukur dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai 5,83%.

Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2007 yang tumbuh sebesar 6,48%. Pertumbuhan perekonomian di kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2008 mempunyai besaran dengan kisaran 2,14 sampai 8,17 persen. Kabupaten Indramayu adalah kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah, sedangkan Kota Bandung adalah kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang paling besar.

Tabel 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2008
Termasuk Migas (persen)

No.	Kab/Kota	2006	2007*)	2008**)
1	Kab. Bogor	5,95	6,05	5,58
2	Kab. Sukabumi	3,92	4,19	3,89
3	Kab. Cianjur	3,34	4,18	4,04
4	Kab. Bandung	5,80	5,92	5,30
5	Kab. Garut	4,11	4,76	4,69
6	Kab. Tasikmalaya	4,01	4,33	4,02
7	Kab. Ciamis	3,84	5,01	4,94
8	Kab. Kuningan	4,07	4,22	4,28
9	Kab. Cirebon	5,14	5,35	4,91
10	Kab. Majalengka	4,18	4,87	4,57
11	Kab. Sumedang	4,17	4,64	4,58
12	Kab. Indramayu	2,42	2,65	2,14
13	Kab. Subang	3,36	4,85	4,74
14	Kab. Purwakarta	3,87	3,90	4,99
15	Kab. Karawang	7,52	5,44	6,93
16	Kab. Bekasi	5,99	6,14	6,07
17	Kab. Bandung Barat	5,13	5,35	5,08
18	Kota Bogor	6,03	6,09	5,98

19	Kota Sukabumi	6,23	6,51	6,11
20	Kota Bandung	7,83	8,24	8,17
21	Kota Cirebon	5,54	6,17	5,64
22	Kota Bekasi	6,07	6,44	5,94
23	Kota Depok	6,65	7,04	6,42
24	Kota Cimahi	4,82	5,03	4,77
25	Kota Tasikmalaya	5,11	5,98	5,70
26	Kota Banjar	4,71	4,93	4,82
Jawa Barat		6,02	6,48	5,83

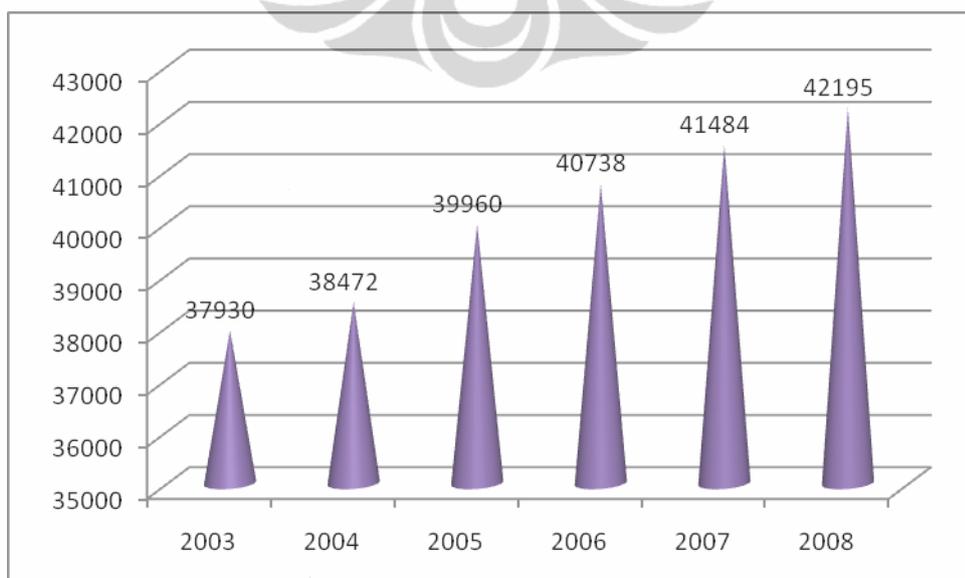
Sumber : PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat 2006-2008

Keterangan: *) Angka perbaikan

**) Angka sementara

Dari tabel 2.2. LPE kabupaten/kota atas dasar harga konstan 2000 termasuk migas, tiga besar dengan LPE tertinggi dicapai oleh masing-masing Kota Bandung sebesar 8,17 persen, Kabupaten Karawang 6,93 persen dan Kota Depok sebesar 6,42 persen.

Pada tahun 2008 penduduk di kabupaten/kota Jawa Barat yang terbanyak di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 4,4 juta jiwa dan diikuti oleh Kabupaten Bandung 3,1 juta jiwa. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi di tahun lalu. Sedangkan penduduk terkecil berada di kota Banjar yaitu sebanyak 0,18 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2008 mencapai 42,19 juta jiwa. Pada tahun 2005 baru mencapai 39,96 juta jiwa, meningkat lagi menjadi 40,74 juta jiwa di tahun 2006, sedangkan tahun 2007 menjadi 41,48 juta jiwa



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008

Grafik 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Jawa Barat Tahun 2003-2008 (ribu)

Di tahun 2008, kepadatan penduduk Jawa Barat mencapai 1 441,24 orang per kilo meter persegi. Kota Bandung masih merupakan daerah terpadat, yaitu sebesar 14 234,53 orang per kilometer persegi, sedangkan yang terendah Kabupaten Ciamis hanya sebesar 709,64 orang per kilometer persegi.

Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari "Angkatan Kerja" dan "Bukan Angkatan Kerja". Proporsi penduduk yang tergolong "Angkatan Kerja" adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja.

Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja yang tidak terserap yang di kategorikan sebagai pengangguran. Pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat sebanyak 18.743.979 orang. Yang aktif bekerja sebanyak 16.480.395 orang atau sebesar 87,9 persen dan yang menganggur sebanyak 2.263.584 orang atau sebesar 12,1 persen.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Gambaran pembangunan pendidikan di Jawa Barat dilihat dari besarnya capaian angka melek huruf (AMH). Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf di Jawa Barat mencapai sekitar 94,66 persen pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 94,93 persen di tahun 2009. Kelompok penduduk yang buta huruf juga menjadi fokus pembangunan bidang pendidikan. Dari tahun ke tahun upaya penurunan kelompok yang buta huruf senantiasa diupayakan. Diantaranya melalui pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan non formal dengan indikator kinerja meningkatnya warga belajar dan kelompok

belajar keaksaraan. Angka Buta Huruf menggambarkan presentase pada kelompok penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis.

Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah dan angka buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah. Hasil Suseda 2009 menginformasikan bahwa APS penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 97,73 persen. Pada tahun 2008 mencapai 96,00 persen. Artinya pada Tahun 2009 dari seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun, yang masih bersekolah sebesar 97,73 persen, sedangkan sebesar 2,27 ada yang tidak/belum bersekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi.

APS kelompok penduduk usia 13 – 15 tahun sebesar 78,68 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 81,38 persen pada tahun 2009. Pada kelompok penduduk usia 16 – 18 tahun mencapai 42,59 persen naik sebesar 2,12 persen dibanding kondisi pada tahun 2008. Secara umum untuk semua jenjang pendidikan, APS di Jawa Barat mengalami peningkatan dibanding keadaan pada tahun 2008. Semakin tinggi level pendidikan, persentase penduduk yang bersekolah cenderung menurun karena penduduk masih berfokus untuk menamatkan pendidikan dasar.

Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Pada tahun 2008 jumlah puskesmas di Jawa Barat adalah 1.017 buah, sementara jumlah puskesmas pembantu 1.516 buah dan puskesmas keliling 697 buah. Sedangkan jumlah tenaga medis di puskesmas pada tahun 2008 sebesar 2.233 orang masing-masing dokter umum sebanyak 1.570 orang dan dokter gigi sebanyak 663 orang.

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Jawa Barat yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Di Indonesia sektor industri dibagi menjadi empat kelompok yaitu : Industri berskala besar, sedang dan industri kecil atau industri usaha kerajinan rumah tangga. Dalam pengumpulan data Statistik, pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini adalah: (1) industri besar yaitu industri yang menyerap tenaga kerja 100 orang atau lebih, (2) industri sedang yaitu industri yang mempekerjakan antara 20 sampai dengan 99 orang, (3) industri berskala kecil yaitu industri yang memiliki 5 – 19 orang tenaga kerja, dan (4) usaha kerajinan rumah tangga yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Industri besar di Jawa Barat sebanyak 3.309 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.826.749 orang, dengan jumlah investasi sebesar 3.016.397 juta rupiah. Sedangkan industri kecil menengah sebanyak 197.134 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.206.532 orang, dengan investasi sebesar 2.206.532 juta rupiah.

Di Jawa Barat peranan perhubungan darat cukup dominan terutama untuk menyalurkan produk industri berbagai daerah terutama di Pulau Jawa, dan bahan baku yang melalui pelabuhan laut Tanjung Priok. Selain itu, perhubungan darat sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan perekonomian di pedesaan.

Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah.

Panjang jalan di Jawa Barat pada akhir tahun 2008 adalah 37.731,76 km. Jika dirinci menurut jenis permukaan jalan maka sepanjang 34.265,74

km atau sebesar 90,81 persen sudah beraspal, 2.629,59 km atau 6,97 persen berkerikil, sisanya sepanjang 836,43 km atau sebesar 2,22 persen masih batu dan tidak dirinci.

Dari seluruh jalan yang ada di Jawa Barat, hanya 8.221,04 km (35,53 persen) dalam kondisi baik, sepanjang 6.754,94 km (29,19 persen) dalam kondisi sedang sedangkan sisanya sepanjang 8.162,72 km (35,28 persen) dalam kondisi rusak dan rusak berat. Dibandingkan tahun yang sebelumnya, kualitas jalan raya sedikit mengalami peningkatan.

2.6 Pola Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

Untuk mengetahui tingkat kemajuan kabupaten/kota di suatu daerah dapat dilihat dari pola pertumbuhan ekonominya. Hal ini dapat dilakukan melalui Tipologi Klaasen yang biasa digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan alat ini dapat melihat kabupaten/kota mana saja yang sudah mengalami kemajuan, sedang berkembang, masih tertinggal maupun yang mengalami kemunduran pertumbuhan ekonomi.

Tipologi Klaasen menggolongkan suatu kabupaten/kota berdasarkan perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kabupaten/kota terhadap LPE dan PDRB per kapita provinsi. Penggolongan ini dibagi menjadi empat golongan ataupun kuadran yaitu:

1. Kuadran I adalah kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat (kabupaten/kota sejahtera), yaitu kabupaten/kota yang LPE dan PDRB per kapitanya lebih tinggi dari rata-rata provinsi.
2. Kuadran II adalah kabupaten/kota yang berkembang, yaitu kabupaten/kota yang LPE lebih tinggi dari rata-rata provinsi namun PDRB per kapitanya lebih rendah dari rata-rata provinsi.
3. Kuadran III adalah kabupaten/kota yang relatif tertinggal (kabupaten/kota kurang berkembang), yaitu kabupaten/kota yang LPE dan PDRB per kapitanya lebih rendah dari rata-rata provinsi.
4. Kuadran IV adalah kabupaten/kota yang maju tetapi tumbuh lamban, yaitu kabupaten/kota yang LPEnya lebih rendah dari rata-rata provinsi tetapi PDRB per kapitanya lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

Keempat kuadran tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.3.
Plot LPE dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota (Tipologi Klaasen)

II	I
Wilayah Kabupaten/Kota Maju tetapi Tumbuh Lamban ($LPE_i < LPE$ rata-rata provinsi dan $PDRB_i > PDRB$ rata-rata provinsi)	Wilayah Kabupaten/Kota Sejahtera ($LPE_i > LPE$ rata-rata provinsi dan $PDRB_i > PDRB$ rata-rata provinsi)
L P E	
PDRB Per Kapita Provinsi	

III Wilayah Kabupaten/Kota Relatif Tertinggal (LPE _i < LPE rata-rata provinsi dan PDRB _i < PDRB rata-rata provinsi)	P R O V	IV Wilayah Kabupaten/Kota Berkembang Cepat (LPE _i > LPE rata-rata provinsi dan PDRB _i > PDRB rata-rata provinsi)
--	----------------------------	---

Kuadran (daerah) I mengandung arti bahwa kabupaten/kota yang berada di daerah ini memiliki LPE yang lebih tinggi dan PDRB per kapita lebih besar dari angka Provinsi Jawa Barat. Bila diasumsikan terdapat pemerataan pendapatan, maka masyarakat di kabupaten/kota yang berada di kuadran ini relatif paling sejahtera dibandingkan yang berada pada kuadran lainnya. Kuadran II menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita lebih besar, namun LPE-nya lebih rendah dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Barat. Masyarakat kabupaten/kota pada kuadran II relatif lebih sejahtera, namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lainnya.

Kuadran yang menunjukkan keterbelakangan pertumbuhan ekonomi juga rendahnya tingkat kesejahteraan penduduknya dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat adalah Kuadran III. Kuadran yang terakhir (IV) ditempati oleh kecamatan yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat, namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih pesat.

Hasil plot posisi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.4 yang menggambarkan perbandingan LPE dan PDRB per kapita kabupaten/kota. (hasil perhitungan Tipologi Klaasen dapat dilihat pada lampiran 3.)

Tabel 2.4.
Plot LPE dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2008

<p>II</p> <p>Kab. Indramayu, Kab. Purwakarta, Kota Cirebon dan Kota Cimahi</p> <p>L P E</p> <p>PDRB Per Kapita Jawa Barat = Rp. 6,892 Juta</p>	<p>I</p> <p>Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kota Bandung</p>
<p>III</p> <p>Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Subang, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar</p> <p>J A B A R</p> <p>5,83%</p>	<p>IV</p> <p>Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi dan Kota Depok</p>

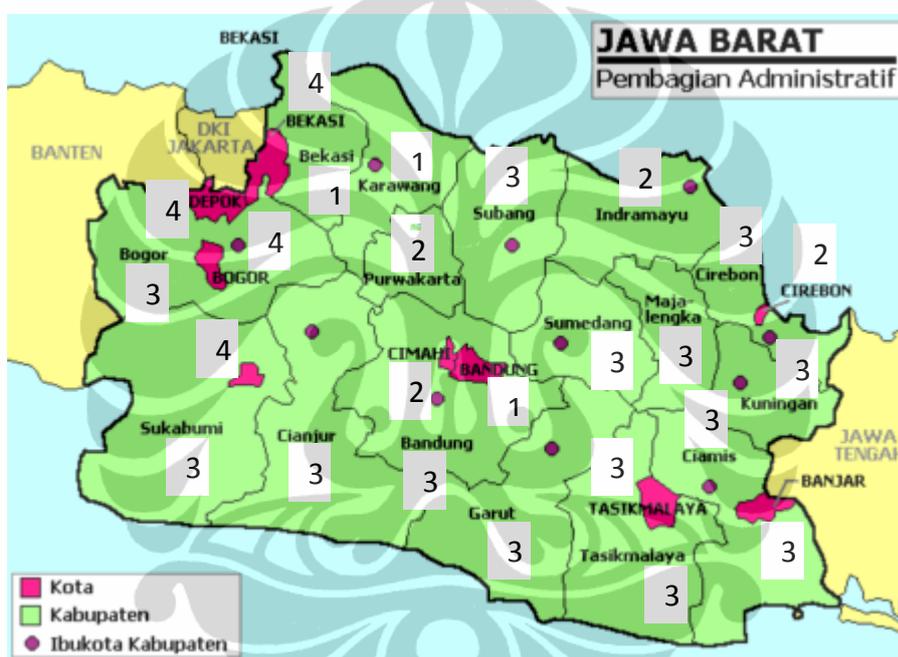
Dari tabel 2.4. terlihat bahwa hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di atas Provinsi Jawa Barat (berada pada kuadran I) yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Posisi pada kuadran I tersebut merupakan posisi ideal, sebab kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja perekonomian dan kemakmuran masyarakat di tiap kabupaten/kota yang bersangkutan relatif lebih makmur dibandingkan kabupaten/kota lainnya secara makro.

Selanjutnya pada kuadran II terdapat 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon dan Kota Cimahi. Posisi pada kuadran ini menggambarkan tingkat kemakmuran yang sudah berada di atas rata-rata namun kinerja perekonomiannya pada tahun 2008 masih relatif rendah, dibandingkan dengan daerah lainnya.

Sebaliknya, kondisi pada kuadran III menunjukkan tingkat kemakmuran dan kinerja ekonomi yang relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota pada umumnya. Daerah-daerah yang berada pada kuadran III pada tahun 2008 terdiri dari 14 kabupaten/kota, yaitu Kab. Bogor, Kab.

Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Subang, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Untuk kuadran IV yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk yang masih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun kinerja perekonomiannya cukup pesat, ditempati oleh Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi dan Kota Depok. Posisi masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klaasen tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:



Gambar 2.1.
Posisi Kabupaten/Kota Berdasarkan Tipologi Klaasen

Dari gambar 2.1. terlihat bahwa kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori daerah relatif tertinggal (kuadran 3) berada di daerah pinggiran dan terdapat beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi lain. Sedangkan kabupaten/kota yang sejahtera (kuadran 1), maju tetapi tumbuh lamban (kuadran 2) dan yang berkembang cepat (kuadran 4) berada di pusat provinsi seperti Kota Bandung, Kota Cimahi dan berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta atau daerah penyangga ibu kota seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok dan yang lainnya. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa daerah yang relatif tertinggal (LPE

yang rendah dan PDRB per kapita yang rendah) terletak jauh dari pusat kota (daerah pinggiran). Adapun daerah dengan LPE yang tinggi dan PDRB per kapita yang tinggi atau salah satu diantaranya cukup tinggi berada di sekitar/dekat pusat kota kecuali Kota Cirebon.

